BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari BAB sebelumnya yang merupakan hasil pengamatan maupun keterangan dari pembimbing perusahaan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam tahapan proses penyediaan anggaran, prosedur penyusunan anggaran pun berpengaruh penting untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Realisasi anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang telah diberikan kewenangannya melalui anggaran pemerintah selama satu tahun yang digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu dari realisasi anggaran yang sudah digunakan akan dilaporkan melalui laporan realisasi anggaran.
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung mengalami berbagai hambatan pada saat penyusunan laporan realisasi anggaran, hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :
    a. Keterlambatan pada saat penyerahan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

b. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan administrasi yang ada dari setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung adalah sebagai berikut :

a. Pengguna anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas harus bertindak lebih tegas, responsif dan juga persuasif.
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan administrasi dan keuangannya yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung ada saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dimasa yang akan datang. Adapun saran yang diberikan penulis, yaitu :

1. Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran yang diterapkan selama ini sudah baik, tetapi perlu untuk ditingkatkan dalam hal pengarsipan dokumen-dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai bukti didalam proses penyusunan laporan keuangan.

2. Dalam pelaporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung sebaiknya sesuai dengan kebijakan perusahaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006, agar lebih tersusun dan juga dapat dipertanggungjawabkan.